

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, S. 2014. *Pemeringkatan Cagar Budaya Tidak Bergerak*. Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Vol.8 No.1.
- Amiruddin, Z. A. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anonim. 2010. *Laporan Pemintakatan (Zoning) Benteng Ujungpandang Kota Makassar*. Makassar: Kelompok Kerja Perlindungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar.
- Budihardjo, E. 1997. *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung : PT Alumni.
- Cst Kansil, C. S. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Dwiyanto, D. 2012. *Menyongsong Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Studi Kasus di Provinsi DIY*. Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI).
- Erni. 2019. *Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Firwana, N. 2020. *Pengertian Sinkronisasi*. Course Hero.
- Haryati. 2016. *Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Fort Rotterdam Kota Makassar dengan Pendekatan Revitalisasi*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Iswandi. *Nilai Penting Benteng Ujungpandang (Fort Rotterdam)*. Makassar: Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan.

Julyano, S. 2019. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, Vol 01, No 01.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kansil, C. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Huum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Marihandono, D. 2008. Wacana, Vol.10 No.1. *Perubahan Peran dan Fungsi Benteng*.

Marzuki, P. M. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Mulyadi, Y. 2019. *Olah Rasa dalam Tata Ruang yang Berbudaya*. Jakarta: Detik News.

Naskah Akademik. *Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Kabupaten Tanah Bumbu*.

Nurbani, S. d. 2016. *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertai dan Tesis (buku ketiga)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Pampang, M. A. 2016. *Buletin Somba Opu volume 19*. Makassar: Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Prayogo, R. T. 2016. *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13, No 02.

Rahardjo, S. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- _____. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.
- Rato, D. 2010. *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Remaja, D. G. 2018. *Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kertha Wicaksana.
- Remaja, N. G. 2014. *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*. Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol 2, No 1.
- Soeprapto, M. F. 2007. *Ilmu Perundangan-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soerjono Soekarno, S. M. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Soeroso, R. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumalyo, Y. 1999. *Ujung Pandang Perkembangan Kota dan Arsitektur Pada Akhir Abad 17 Hingga Awal Abad 20. Dalam Panggung sejarah*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Yayasan obor Indonesia.
- Sumiarni, E. 2013. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Statistik*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka.
- Supardi, N. 2013. *Kebudayaan Dalam Lembaga Pemerintahan dari Masa ke Masa*. Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.
- Tjandrasasmita, D. U. 1986. *Petunjuk Teknik Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala*. Jakarta Pusat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal

Kebudayaan Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Zaman, S. 2021. *Evaluasi Kegiatan Konservasi Benteng Rotterdam*. Makassar: Universitas Hasanuddin .

Internet

Dikutip November 13, 2020, dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan:
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel/benteng-rotterdam-dan-permasalahannya/>

Dikutip November 2020, dari UNESCO:
<https://whc.unesco.org/en/conventiontext/>

Dikutip November 5, 2021, dari Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya:
<http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/cagarbudaya/detail/PO2015071000005/>

Dikutip November 11, 2021, dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <https://www.dpr.go.id/bk/perlak-uu/id/620>

Dikutip April 8, 2022, dari Sosial97: sosial79.com/2020/07/pengertian-eksistensi-atau-keberadaan.html

Dikutip Mei 10, 2022, dari Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia:
<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/harmonisasi-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan#:~:text=Secara%20etimologis%2C%20harmonisasi%20berasal%20dari,terikat%20secara%20serasi%20dan%20sesuai.>

Dikutip Mei 22, 2022, dari <https://artonang.blogspot.com/2015/01/ilmu-perundang-undangan.Html>

Dikutip dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali:
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbali/zonasi-situs-wadu-paa/>

Lampiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar
Budaya.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.34/HM.001/MKP/2008 tentang Pengamanan Objek Vital
Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.59/PW.007/MKP/2010.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang
Dilestarikan.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025/M/2014
tentang Benteng Rotterdam Sebagai Situs Cagar Budaya
Peringkat Nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Makassar 2015-2034.